

W. BADAN KEUANGAN DAERAH



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029



**BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029, dengan tetap mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, serta kegiatan Badan Keuangan Daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Di samping itu, dokumen ini juga memuat sasaran kegiatan yang dirumuskan melalui indikator kinerja (output) sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang terpadu, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan Renstra ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan partisipasi dalam proses penyusunan dokumen ini. Harapan kami, pelaksanaan Rencana Strategis ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan pengelolaan pendapatan daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan di Kota Payakumbuh.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029 ini dapat dijadikan pedoman dan acuan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Payakumbuh, September 2025
**Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH**



Drs. BASNIDA EFRIZAL, M. Si
NIP. 19710412 199101 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Hal
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	7
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	22
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	23
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	23
2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah	24
2.2 PERMASALAHAN dan ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	25
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.2.2 Isu Strategis.....	29
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah	32
3.2 Sasaran Rentra Perangkat Daerah	32
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	34
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	35

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
	BIDANG URUSAN	37
4.1	Uraian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	37
4.2	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	61
4.3	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	62
BAB V	PENUTUP	65
	KERTAS KERJA	
1.	Metadata Indikator Kinerja	
2.	Pohon Kinerja	
3.	Manajemen Resiko	
4.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	
5.	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	
6.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	
7.	Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis ditingkat Perangkat Daerah (PD) untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing PD sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh berfungsi sebagai pedoman bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun kedepan. Adapun yang melatarbelakangi disusunnya Renstra 2025-2029 adalah selaras dengan disusunnya RPJMD 2025-2029 Kota Payakumbuh, yang mana RPJMD tersebut merupakan penjabaran dari visi, misi Kepala Daerah terpilih yang mempertimbangkan isu strategis serta permasalahan aktual dan selaras dengan kebijakan nasional dan propinsi Sumatera Barat, kemudian dirumuskan menjadi tujuan, sasaran dan target kerja sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah.

Sebagai salah satu institusi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pendapatan daerah. Dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah menitikberatkan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pendapatan daerah. Adapun urusan yang diampu adalah administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pemerintahan Daerah tersebut diatas dan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Secara teknis pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan oleh BKD Kota Payakumbuh mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka BKD Kota Payakumbuh sebagai Pengelola Keuangan Daerah yang menunjang urusan Pemerintah Daerah dan melaksanakan pengelolaan keuangan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda.
4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 pasca pemilihan kepala daerah serentak. Dokumen ini akan dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) guna lebih memfokuskan pada kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah sebagai landasan dan pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, maka Badan Keuangan Daerah harus menyelaraskan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tertuang pada RPJMD dimaksud.

Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Perangkat Daerah pada masa RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 berakhir.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 di dasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusatamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Lap. Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemda;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010- 2030 (lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 68);

22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 71)
24. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan Renstra Badan Keuangan Daerah ini adalah :

1. Sebagai tolok ukur kinerja Badan Keuangan Daerah;
2. Sebagai pedoman dan landasan bagi Badan Keuangan Daerah dalam menyusun rencana kinerja, rencana kerja anggaran dan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2025- 2029;
4. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah periode Renstra yang lalu.

Berkaitan dengan maksud di atas, tujuan penulisan Renstra ini adalah :

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah;
2. Menjadi landasan penyusunan rencana kerja Badan Keuangan Daerah;
3. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama tahun 2025-2029;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah;

5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian indikator, tujuan, program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategi (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN dan ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGIS dan ARAH KEBIJAKAN

Memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja dan indikator kinerja, target, pagu indikatif, serta target keberhasilan melalui pengukuran IKU dan IKK

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Terhadap perencanaan serta pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah berdasar atas otonomi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan fungsi Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah/ penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan keuangan;
2. Penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah/pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan keuangan;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah/pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah fungsi penunjang urusan keuangan;
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan dan/ pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang;
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah/pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan keuangan;
7. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pelayanan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah;
8. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pengelolaan pembukuan dan penagihan pajak daerah.

Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja terhadap organisasi perangkat daerah, termasuk Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, karena Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Keuangan tidak sesuai lagi dengan kondisi dan ketentuan perundangan

yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 4 menyatakan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah serta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 5 menyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, maka Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut;

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris. Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) terdiri dari :

- I. Kepala Badan;
- II. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan
- III. Bidang Pendapatan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan;
 - c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
- IV. Bidang Anggaran, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
- V. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan II;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas;
 - c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
- VI. Bidang Aset, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penataan Aset;
 - b. Sub Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset;
 - c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
- VII. Bidang Akuntansi, membawahi:
 - a. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Informasi Keuangan Daerah;
 - c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

VIII. Kelompok Jabatan Fungsional PPPK

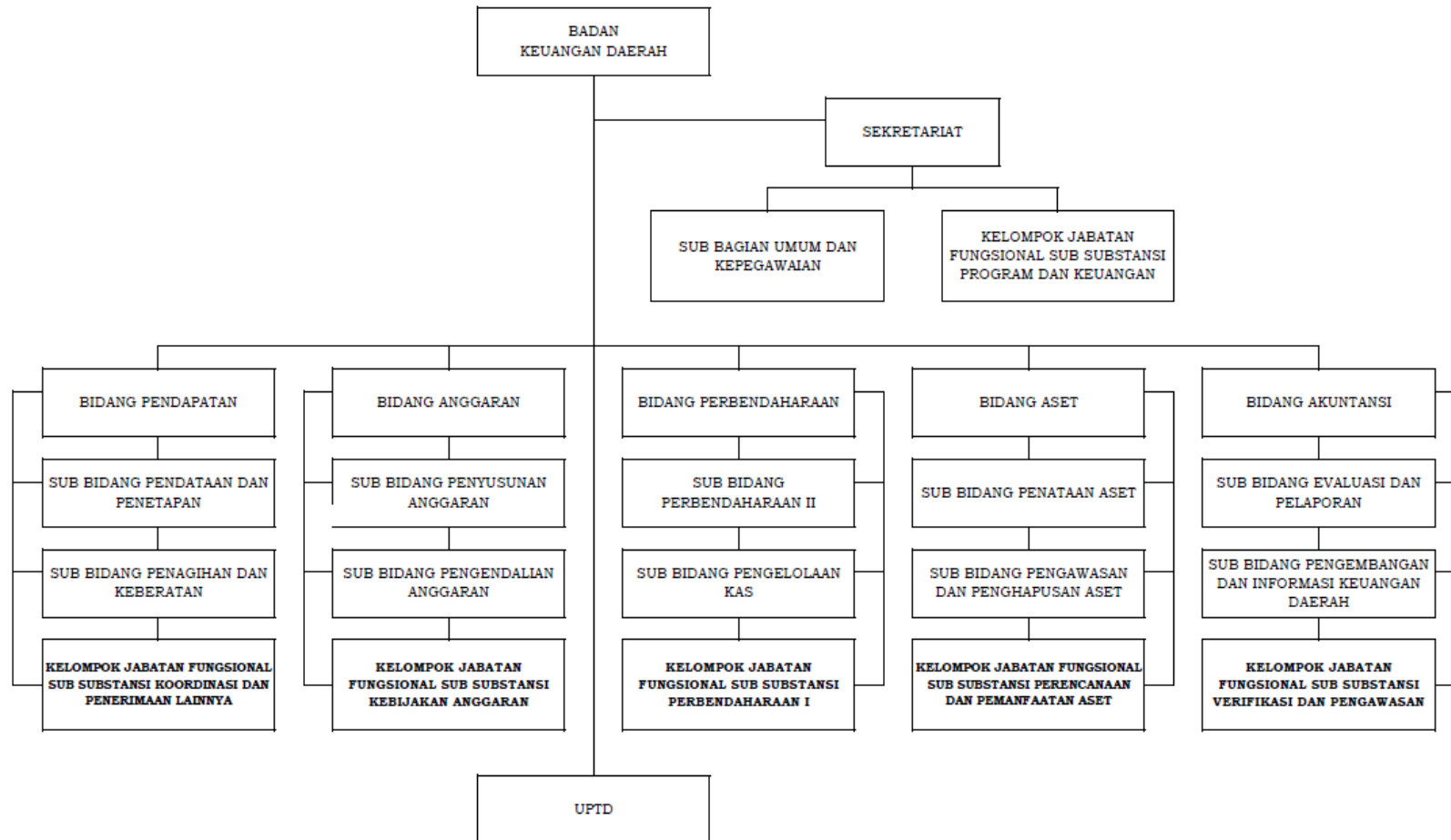
- a. Jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

IX. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) terdiri dari:

- a. Unit Pelayanan Pajak Daerah;
- b. Unit Pelayanan Pembiayaan Daerah.

Berikut bagan struktur organisasi di Badan Keuangan Daerah :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh tidaklah lepas dari ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia sebagai pelaku dan pelaksana pengelolaan keuangan maupun sumber daya berupa aset yang dimiliki.

1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah, saat ini terdapat 74 (tujuh puluh empat) personil yang terdiri dari 58 orang PNS, 3 PPPK, dan 13 orang Pegawai Kontrak/IT/non PNS dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.2.a
Klasifikasi Golongan Sumber Daya Manusia BKD

No	Jabatan	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
				LK	PR	
1	Kepala Badan	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1 Orang
2	Fungsional AKPD Ahli Madya	Pembina Utama Muda	IV/c	-	1	1 Orang
3	Sekretaris Badan	Pembina Tk.I	IV/b	1	-	1 Orang
4	Kepala Bidang	Pembina	IV/a	2	2	4 Orang
5	Kasubbid	Pembina	IV/a	-	4	4 Orang
6	Kasubbid	Penata Tk.I	III/d	3	3	6 Orang
7	Kasubbag	Penata Tk.I	III/d	1	-	1 Orang
8	Fungsional AKPD Ahli Muda	Penata Tk.I	III/d	2	6	8 Orang
9	Fungsional AKPD Ahli Muda	Penata	III/c	1	2	3 Orang
10	Fungsional AKPD Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	3	-	3 Orang
11	Fungsional Perencana Ahli Muda	Penata	III/c	-	1	1 Orang
12	Kepala UPTD	Pembina	IV/a	-	1	1 Orang
13	Kepala UPTD	Penata Tk.I	III/d	-	1	1 Orang
14	Kasubbag Tata Usaha UPTD	Penata Tk.I	III/d	-	1	1 Orang
15	Kasubbag Tata Usaha UPTD	Penata	III/c	1	-	1 Orang
16	Bendahara	Penata	III/c	-	1	1 Orang
17	Bendahara	Penata Muda Tk.I	III/b	1	-	1 Orang
18	Pengadministrasi Umum	Penata Tk.I	III/d	-	1	1 Orang
19	Analisis Laporan Keuangan	Penata Tk.I	III/d	-	1	1 Orang

20	Analisis Laporan Keuangan	Penata Muda Tk.I	III/b	-	1	1 Orang
21	Analisis Layanan Informasi Penerimaan Negara	Penata Tk.I	III/d	-	1	1 Orang
22	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Penata	III/c	1	-	1 Orang
23	Analisis Aset Negara	Penata	III/c	-	1	1 Orang
24	Analisis Transaksi Keuangan	Penata	III/c	-	1	1 Orang
25	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi	Penata	III/c	-	1	1 Orang
26	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	Penata Muda Tk.I	III/b	2	-	2 Orang
27	Penyusun Laporan Keuangan	Penata	III/c	-	1	1 Orang
28	Pengelola Data Layanan Perpajakan	Penata Muda Tk.I	III/b	-	1	1 Orang
29	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Penata Muda Tk.I	III/b	-	1	1 Orang
30	Analisis Pendapatan Daerah	Penata Muda Tk.I	III/a	-	1	1 Orang
31	Penelaah Tekhnis Kebijakan	Penata Muda Tk.I	III/a	-	1	1 Orang
32	Pengadministrasi Pajak	Pengatur Tk.I	II/d	-	1	1 Orang
33	Pengadministrasi Pajak	Pengatur	II/c	1	-	1 Orang
34	Pengadministrasi Pajak	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1	-	1 Orang
35	Pengadministrasi Penerimaan	Pengatur	II/c	1	-	1 Orang
36	Penata Laksana Barang Terampil	Pengatur	II/c	-	1	1 Orang
37	Pranata Komputer Terampil	-	VII	3	-	3 Orang
38	Penata Layanan Operasional	-	IX	-	2	2 Orang
39	Penata Layanan Operasional	-	VII	-	1	1 Orang
Jumlah						65 Orang

Tabel 2.1.2.b
Kualifikasi Pendidikan Sumber Daya Manusia BKD

No	Jabatan	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
			LK	PR	
1	Kepala Badan	S-2	1	-	1 Orang
2	Fungsional AKPD Ahli Madya	S-2	-	1	1 Orang
3	Sekretaris Badan	S-2	1	-	1 Orang
4	Kepala Bidang	S-2	2	1	3 Orang
5	Kepala Bidang	S-1	-	1	1 Orang
6	Kasubbid	S-2	-	5	5 Orang
7	Kasubbid	S-1	2	2	4 Orang
8	Kasubbid	D-IV	1	-	1 Orang
9	Kasubbag	S-1	1	-	1 Orang
10	Fungsional AKPD Ahli Muda	S-2	-	5	5 Orang
11	Fungsional AKPD Ahli Muda	S-1	3	3	6 Orang
12	Fungsional AKPD Ahli Pertama	S-2	1	-	1 Orang
13	Fungsional AKPD Ahli Pertama	S-1	2	-	2 Orang
14	Fungsional Perencana Ahli Muda	S-1	-	1	1 Orang
15	Kepala UPTD	S-2	-	1	1 Orang
16	Kepala UPTD	D-III	-	1	1 Orang
17	Kasubbag Tata Usaha UPTD	S-1	1	1	2 Orang
18	Bendahara	S-1	1	1	2 Orang
19	Pengadministrasi Umum	SLTA	-	1	1 Orang
20	Analisis Laporan Keuangan	S-2	-	1	1 Orang
21	Analisis Laporan Keuangan	S-1	-	1	1 Orang
22	Analisis Layanan Informasi Penerimaan Negara	D-IV	-	1	1 Orang
23	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	D-IV	1	-	1 Orang
24	Analisis Aset Negara	S-1	-	1	1 Orang
25	Analisis Transaksi Keuangan	S-2	-	1	1 Orang
26	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi	S-1	-	1	1 Orang
27	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	S-1	2	-	2 Orang
28	Penyusun Laporan Keuangan	S-1	-	1	1 Orang
29	Pengelola Data Layanan Perpajakan	D-III	-	1	1 Orang
30	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	D-III	-	1	1 Orang
31	Analisis Pendapatan Daerah	S-I	-	1	1 Orang
32	Penelaah Tekhnis Kebijakan	D-IV	-	1	1 Orang
33	Pengadministrasi Pajak	SLTA	2	1	3 Orang
34	Pengadministrasi Penerimaan	SLTA	1	-	1 Orang
35	Penata Laksana Barang Terampil	D-III	-	1	1 Orang
36	Pranata Komputer Terampil	D-III	3	-	3 Orang

37	Penata Layanan Operasional	S-I	-	2	2 Orang
38	Penata Layanan Operasional	D-III	-	1	1 Orang
Jumlah					65 Orang

Berdasarkan tabel diatas, ASN BKD saat ini berjumlah 65 orang yaitu PNS 59 orang dan PPPK 6 orang. Tingkat pendidikan di dominasi setingkat S1 atau sebesar 42,62% dari seluruh pegawai yang ada. Disamping itu, Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh telah memiliki fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah sebanyak 16 orang yaitu AKPD yang melalui uji kompetensi dan yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan sebanyak 12 orang dan 5 orang AKPD sebagai tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Aset

Aset atau sarana dan prasarana merupakan hal sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah tanpa sarana dan prasarana akan dapat menghambat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Badan Keuangan Daerah dari kondisi prasarana yang ada saat ini seperti gedung kantor masih melekat dengan Sekretariat Daerah, sehingga ruangan yang ada sekarang sangat sempit dan tidak bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Namun disisi lain kondisi sarana sangat mendukung walaupun masih ada yang perlu dilengkapi secara bertahap seperti komputer, almari, kursi, AC dan sebagainya.

Tabel 2.1.2.c
Aset BKD

JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
Mesin ketik	5	buah	Baik
PC Unit	63	buah	Baik
PC Server	2	buah	Baik
UPS	71	buah	Baik
Printer	62	buah	Baik
Laptop	6	buah	Baik
LCD Proyektor	5	buah	Baik
Layar	1	buah	Baik
Komputer	40	buah	Baik

Telepon	20	buah	Baik
Mesin Fax	2	buah	Baik
Rak Besi	33	buah	Baik
Rak Kayu	40	buah	Baik
Kamera Foto Digital	5	buah	Baik
Wireless Mic.	1	buah	Baik
Gambar presiden/Wapres	2	buah	Baik
Kursi Tamu	4	stel	Baik
Meja Rapat	35	buah	Baik
Meja Tulis	29	buah	Baik
Meja ½ biro	107	buah	Baik
Meja Komputer	54	buah	Baik
Meja Knap	44	buah	Baik
Meja Ketik	46	buah	Baik
Kursi Putar	33	buah	Baik
Kursi Besi	107	buah	Baik
Kursi kayu	112	buah	Baik
Kursi Lipat	221	buah	Baik
Almari besi	7	buah	Baik
Almari Kayu	20	buah	Baik
Almari Kaca	15	buah	Baik
Mesin Penghisap Debu	1	buah	Baik
Radio Cassette Rec.	1	buah	Baik

Secara umum kondisi sarana prasarana BKD cukup baik, salah satu sarana yang digunakan adalah kendaraan dinas, dimana kendaraan dinas roda 4 (empat) saat ini berjumlah 10 unit, sedangkan kendaraan roda 2 (dua) berjumlah 35 unit.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kemudian sesuai kinerja yang telah diperjanjikan dan tertuang pada Indikator kinerja utama (IKU) tahun 2023-2026 adalah indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah maka perlu dilakukan pengukuran IPKD. Berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.3/6145/BSKDN Tanggal 13 Desember 2024 tentang Penyampaian SK Mendagri tentang Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2023, Tahun ukur 2024 tercantum bahwa Kota Payakumbuh meraih predikat Nilai B (Perlu Perbaikan) atau 71,756 dimana Kota Payakumbuh berada pada klaster kemampuan keuangan daerah rendah. Hal ini jika dibanding tahun ukur sebelumnya, yakni ditahun 2023 Pemerintah Kota Payakumbuh mendapat nilai A (kategori Baik) atau 77,433. Penurunan secara signifikan ada pada masing masing dimensi pengukuran. perihal penyampaian keputusan penetapan hasil pengukuran IPKD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.3.a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah
Kota Payakumbuh

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Indikator Kinerja Renstra Tahun ke-						Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun Ke-						Rasio Capaian (%)					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Opini laporan keuangan pemerintah daerah				WTP	WTP	WTP				WTP	WTP	WTP				100%	100%	100%			
2	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah				12%	12%	12%				16,18 %	13,43 %	18,01%				>100%	>100%	>100%			
3	Nilai AKIP BKD oleh Inspektorat				A	A	A				A	A	A				100%	100%	100%			
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)						74,00	75,00	76,00	78,00			71,89	77,43	71,76	*			<100%	>100%	<100%	*

TABEL 2.1.3.b
ANGGARAN dan REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH

No	URAIAN	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Kinerja Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian (%)					Rata Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	-	3	4	5	6	-	8	9	10	11	-	13	14	15	16	18	19
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	10.152.551.266	10.728.404.840	11.734.726.177	12.314.464.281	-	9.358.337.555	9.654.181.280	10.764.069.176	11.276.961.379	-	88%	88%	84%	85%	3.078.616.071	2.819.240.345
1	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	-	47.900.560	41.805.290	49.643.900	56.774.650	-	43.858.900	35.199.470	26.595.290	50.374.190	-	92%	84%	54%	89%	14.193.663	12.593.548
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH (Gaji dan Tunjangan ASN)	-	7.676.408.780	8.010.885.154	8.150.157.557	8.244.051.441	-	7.320.344.720	7.528.985.699	7.706.962.388	7.826.651.820	-	95%	94%	95%	95%	2.061.012.860	1.956.662.955
3	ADMINISTRASI KEPECAWAIAAN PERANGKAT DAERAH	-	-	34.535.800	244.297.500	113.694.500	-	-	34.535.800	150.071.674	102.599.040	-	0%	100%	61%	90%	28.423.625	25.649.760
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	-	779.987.500	1.084.944.170	1.254.995.440	1.229.916.500	-	545.304.682	713.855.670	1.058.527.931	1.145.589.863	-	70%	66%	84%	93%	307.479.125	286.397.466
5	PENYEDIAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	-	-	-	476.885.080	741.471.550	-	-	-	462.917.520	683.700.000	-	0%	0%	97%	92%	185.367.888	170.925.000
6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	-	248.714.426	247.649.426	250.161.700	554.370.640	-	230.714.983	231.646.952	246.502.586	246.494.489	-	93%	94%	99%	44%	138.592.660	61.623.622
7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	-	299.540.000	299.540.000	299.540.000	365.140.000	-	287.053.769	280.741.128	291.433.038	301.140.988	-	96%	94%	97%	82%	91.285.000	75.285.247
8	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	-	1.100.000.000	1.009.045.000	1.009.045.000	1.009.045.000	-	931.060.501	829.216.561	821.058.749	920.410.989	-	85%	82%	81%	91%	252.261.250	230.102.747
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	3.653.168.090	3.227.809.310	4.351.896.790	3.666.558.900	-	2.849.793.890	2.792.532.043	3.462.512.250	2.662.678.003	-	71%	74%	73%	79%	916.639.726	665.669.502

1	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	-	1.559.231.800	1.488.072.050	1.382.075.450	1.621.285.650	-	1.456.907.550	1.401.311.940	1.339.965.985	1.445.209.255	-	93%	94%	97%	89%	405.321.413	361.302.314
2	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	-	492.399.890	551.417.250	813.350.460	393.914.400	-	480.186.800	526.222.970	773.517.360	314.776.370	-	98%	95%	95%	80%	98.478.600	78.694.093
3	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	-	749.248.210	601.728.910	1.065.939.680	271.900.150	-	633.322.890	571.627.285	958.735.265	241.222.792	-	85%	95%	90%	89%	67.975.038	60.305.698
4	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	500.000.000	233.217.130	750.000.000	1.227.649.000	-	-	-	208.190.400	518.850.784	-	0%	0%	28%	42%	306.912.250	129.712.696
5	PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	-	352.288.190	353.373.970	340.531.200	151.809.700	-	279.376.650	293.369.848	182.103.240	142.618.802	-	79%	83%	53%	94%	37.952.425	35.654.701
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	1.014.486.840	1.053.876.350	1.234.083.380	970.618.150	-	951.464.025	986.716.103	936.587.480	808.939.092	-	94%	94%	76%	83%	242.654.538	202.234.773
1	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	1.014.486.840	1.053.876.350	1.234.083.380	970.618.150	-	951.464.025	986.716.103	936.587.480	808.939.092	-	94%	94%	76%	83%	242.654.538	202.234.773
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	568.515.550	676.710.085	922.559.155	870.475.400	-	449.739.105	615.059.953	765.121.560	653.450.600	-	79%	91%	83%	75%	217.618.850	163.362.650
1	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	568.515.550	676.710.085	922.559.155	870.475.400	-	449.739.105	615.059.953	765.121.560	653.450.600	-	79%	91%	83%	75%	217.618.850	163.362.650

Tabel 2.1.3.c
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2024
(Uraian SKOR 6 Dimensi IPKD)

No	Dimensi IPKD	Bobot	Tahun Ukur 2024	Tahun Ukur 2023	Ket
1	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	15	9,586	11,395	
2	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20	15,000	20,000	
3	Transparansi pengelolaan keuangan daerah	15	13,448	15,000	
4	Penyerapan anggaran	20	13,333	13,333	
5	Kondisi keuangan daerah	15	5,388	2,704	
6	Opini BPK atas LKPD	15	15,000	15,000	
	INDEKS TOTAL	100	71,756	77,433	

Nilai Indeks/Skor IPKD tersebut diukur melalui 6 dimensi yang meliputi :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. Penyerapan anggaran;
5. Kondisi keuangan daerah;
6. Opini BPK atas LKPD.

Dari 6 (enam) dimensi diatas, jika dibandingkan dari tahun ukur sebelumnya atau tahun 2023, maka ada 1 (satu) dimensi yang meningkat yaitu dimensi 5 “kondisi keuangan daerah”, namun begitu bobot nya masih jauh dari yang ditetapkan. Kemudian 2 (dua) dimensi memiliki nilai tetap yaitu dimensi 6 “opini BPK atas LKPD” dan dimensi 4 “penyerapan anggaran”. Dimensi yang nilainya turun ada 3 (tiga) yaitu dimensi 1 “kesesuaian dokumen

perencanaan dan penganggaran”, dimensi 2 “pengalokasian anggaran belanja dalam APBD” dan dimensi 3 “transparansi pengelolaan keuangan daerah”.

Berikut tabel capaian indikator kinerja pelayanan pada BKD

Tabel 2.1.3.d
Capaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
Kota Payakumbuh

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Indikator Kinerja	Rasio Capaian (%)	Ket
			2024	2024	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1	IPKD	Skor	76,000	71,756	<100%	IKD/ IK Lainnya
2	Opini LKPD dari BPK	Opini	WTP	WTP	100%	IKU
3	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	30%	28,13%	<100%	IKK
4	Rasio PAD (thd APBD non Migas)	%	12%	18,40%	>100%	IKK
5	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer Ekspenditures)	%	80%	85,87%	>100%	IKK
6	Defiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	(9)%	(7,36)%	>100%	IKK
7	Defiasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	6%	6,51%	<100%	IKK
8	Menajemen aset	Ada/Tidak	ADA	ADA	100%	IKK
9	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	10%	11,49%	<100%	IKK

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kinerja :
 - a. Skor IPKD dengan target 76,000, hanya tercapai pada angka 71,756 dimana kondisi tahun ukur 2024 Pemerintah Kota Payakumbuh mengalami penurunan apabila dibanding dari tahun ukur 2023 yaitu 77,433;
 - b. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah diraih selama 10 (sepuluh) tahun berturut – turut dimulai 2014 sampai dengan tahun 2024

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah selain melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan, juga merupakan perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik atau pelayanan langsung kepada masyarakat diantaranya layanan pajak daerah yang dikelola oleh UPTD Pajak Daerah dan pemberian pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh UPTD Fasilitas pembiayaan.

UPTD Pajak Daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki kewajiban sebagai Wajib Pajak atas pembayaran pajak daerah berupa PBB dan BPHTB. Sedangkan UPTD Fasilitas Pembiayaan adalah unit pelayanan yang memberikan fasilitas pinjaman dana bergulir kepada sekelompok pengusaha kecil menengah yang memiliki usaha baik di bidang industri, perdagangan, peternakan, pertanian, juga unit kecil koperasi. Berikut daftar penyaluran pinjaman dana bergulir UPTD Fasilitas Pembiayaan :

Tabel 2.1.4.
Daftar Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir
UPTD Fasilitas Pembiayaan Kota Payakumbuh

NO.	BIDANG USAHA	JUMLAH	
		ORANG	RUPIAH
1	Industri	47	968.412.100,00
2	Perdagangan	646	8.943.685.882,00
3	Peternakan	106	1.575.627.571,00
4	Pertanian	122	1.098.423.074,00
5	Koperasi	17	1.505.629.779,00
JUMLAH		938	14.091.778.406,00

Jika merujuk kepada tugas dan fungsi utama dari Badan Keuangan Daerah, sasaran pelayanan yang diberikan oleh BKD adalah kepada seluruh perangkat daerah baik itu pelayanan di bidang anggaran yang mencakup penganggaran keuangan, bidang perbendaharaan yang mencakup penatausahaan keuangan daerah, bidang aset yang mencakup kepada penataan dan manajemen aset, bidang akuntansi yang mencakup kepada pelaporan keuangan, dan terakhir bidang pendapatan yang mencakup kepada perangkat daerah teknis yang mengelola penerimaan asli daerah.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Badan Keuangan Daerah dalam menjalankan fungsi layanan publik melalui UPTD Fasilitas Pembiayaan memberikan penyaluran pinjaman pembiayaan daerah yang bermitra kepada salah satu lembaga keuangan yang bergerak dibidang asuransi kerugian atas potensi resiko operasional maupun non operasional. Selain itu BKD juga melakukan kerja sama atau bermitra kepada salah satu notaris yang berkedudukan di Kota Payakumbuh dalam penyaluran pinjaman pembiayaan daerah kepada masyarakat dalam pengikatan agunan pembiayaan, pembuatan perjanjian dan sebagainya.

Bank Nagari sebagai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi mitra utama Badan Keuangan Daerah selaku Kota Payakumbuh, yang mana dalam perikatannya ditunjuk sebagai pemegang uang daerah Kota Payakumbuh dan kemudian berdasarkan ketentuannya melakukan pelayanan jasa perbankan serta pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Kota Payakumbuh yang meliputi penerimaan setoran hasil pendapatan daerah, penerimaan dan penempatan uang daerah baik PAD dana perimbangan serta lain lain PAD yang sah, penerimaan dan penempatan uang daerah yang berasal dari pembiayaan daerah, melakukan pembayaran yang berdasarkan SP2D, serta jasa pelayanan dalam rangka penerimaan dan pembayaran gaji ASN Kota Payakumbuh.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Hubungan yang baik serta dukungan dari stakeholder vertikal maupun horizontal dapat berkontribusi dalam pencapaian kinerja yang lebih baik. Badan Keuangan Daerah dalam pencapaian kinerja peningkatan pengelolaan keuangan daerah melalui BUMD yang ada di Kota Payakumbuh yaitu Perusahaan Umum Daerah Tirta Sago sebagai pemungut salah satu penerimaan daerah retribusi kebersihan, yang mana didapatkan melalui pelayanan penyediaan kebutuhan air bersih di Kota Payakumbuh.

Dengan dukungan kinerja dan pencapaian penerimaan retribusi yang diberikan ini menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD Kota Payakumbuh.

2.1.7. Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah adalah bentuk kerja sama Pemerintah Kota Payakumbuh dengan daerah lain atau pihak lain sebagai upaya untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan daerah. Tujuan Badan Keuangan Daerah melakukan kerja sama daerah salah satunya untuk mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki dalam meningkatkan pencapaian kinerja, pelayanan public yang lebih efisien dan efektif, maupun peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan adanya pertumbuhan pendapatan daerah.

Bentuk kerja sama yang sudah terjalin di Badan keuangan tidak seluruhnya melibatkan daerah lain, namun kerja sama dengan pihak ketiga seperti individu atau badan usaha yang dapat menunjang pencapaian kinerja khususnya pengelolaan pendapatan daerah. Berikut daftar kerja sama BKD tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 :

Tabel 2.1.7.
Bentuk Kerja Sama Badan Keuangan Daerah
Kota Payakumbuh

NO	NOMOR PKS	TANGGAL	PERIHAL	INSTANSI
1	6/MOU/2020	26/08/2020	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN DAERAH	DIRJEN PAJAK, DJPK
2	03/SP/WK-PYK/2020	20/06/2020	PENINGTEGRASIAN DATA PERTANAHAN DENGAN DATA PERPAJAKAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH	KANTOR BPN KOTA PAYAKUMBUH
3	PKS/01/Pajak-Daerah/2022	27/05/2022	PERLUASAN KANAL PEMBAYARAN DIGITAL PAJAK DAERAH KOTA PAYAKUMBUH	BANK NAGARI
4	01/SPK/BKD-PYK/2025	13/05/2025	PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN DALAM PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH	BANK NEGARA INDONESIA
5	900/36/BKD PYK/2020	14/12/2020	PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH	DISDUKCAPIL
6	130/16/PKS/PEM/2024	20/11/2024	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK DAERAH	BAPENDA PROVINSI SUMBAR

7	001/SPK-PAJAKDAERAH/BKD-PYK/2020	18/12/2020	LAYANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA PAYAKUMBUH	BANK NAGARI
---	----------------------------------	------------	---	-------------

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh merupakan salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kota yang memberikan pelayanan kepada masyarakat disamping pelayanan yang diberikan kepada aparatur daerah. Dalam rangka pemberian pelayanan, ditemukanlah permasalahan-permasalahan yang menghambat target kinerja program dan kegiatan yang hendak dicapai. Berikut ini akan diuraikan tentang indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

Mengacu pada tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, maka peranan BKD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Adapun indentifikasi permasalahan dimaksud dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1.a
Identifikasi Permasalahan Pelayanan

No	Esensi Permasalahan		Sumber Data Permasalahan	Identifikasi Jenis Permasalahan
	Uraian	Sebab Akibat		
1	Data Base belum mutakhir	Sehingganya potensi PAD belum tergali keseluruhan	<i>Audit BPK</i>	1.1. Belum Optimalnya Penggunaan Teknologi Digitalisasi
2	Lemahnya kepastian pelayanan pajak daerah	Sehingganya jangka waktu pelayanan bisa cepat bisa lambat	<i>Nilai SKM</i>	2.1. Belum Optimalnya Penggunaan Teknologi Digitalisasi
				2.2. Kurangnya Produktifitas dan efektifitas SDM

3	Rendahnya kesadaran WP	Sehingganya menambah jumlah piutang pendapatan	Audit BPK	3.1. Belum Optimalnya Penggunaan Teknologi Digitalisasi
				3.2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap WP
4	Perencanaan penganggaran belum berbasis kinerja	Sehingganya Belanja SKPD tidak mencerminkan kebutuhan pencapaian output	Audit BPK	4.1. Paradigma SKPD yang masih belum berubah tentang perencanaan penganggaran
				4.2. Indikator kinerja kegiatan yang kurang jelas dan terukur
5	Perencanaan penganggaran belum mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah	Sehingganya perencanaan penganggaran Silpa semakin tinggi	Audit BPK	5.1. Tingginya defisit anggaran
				5.2. Tingginya Ketergantungan pada dana transfer
6	Perencanaan penganggaran yang belum menerapkan Money Follow Program	Sehingganya belum terpenuhinya mandatory spending	Audit BPK	6.1. Masih besarnya variabel cost dari Fix Cost
				6.2. Belum terpenuhinya belanja pegawai maksimal 30%
				6.3 Belum terpenuhinya belanja infrastruktur publik minimal 40%
7	Laporan BMD belum akurat	masih banyak perbaikan pencatatan yang harus dilakukan	Audit BPK	7.1. Belum Optimalnya SDM yang ditugaskan
				7.2. Belum Optimalnya penggunaan Aplikasi MIA
8	Pengelolaan BMD belum tertib	Masih ditemukan pengelolaan aset yang belum sesuai	Audit BPK	8.1. Belum Optimalnya Pengelolaan BMD
				8.2. Kurangnya Produktifitas dan efektifitas SDM dalam memaksimalkan pengelolaan BMD
9	masih belum optimalnya penjelasan CaLK Laporan keuangan baik LK SKPD maupun LK konsolidasi	Sehingganya belum optimalnya kualitas laporan keuangan SKPD dan LKPD	Audit BPK	9.1. Belum Optimalnya Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
10	Masih banyak SKPD yang memiliki SDM pembuat laporan keuangan yang baru dan tidak punya latar belakang akuntansi, baik itu THL maupun P3K.	Sehingganya Proses penyusunan laporan keuangan tidak maksimal dari segi waktu dan pemahaman	Audit BPK	10.1. Kurangnya Produktifitas dan efektifitas SDM

11	Belum terintegrasinya Laporan keuangan yang bersumber dari BOSP, BOK, TPG dan BLUD	Sehingganya menambah kesulitan saat pengumpulan data laporan keuangan	<i>Audit BPK</i>	11.1. Belum Optimalnya Penggunaan Teknologi Digitalisasi
----	--	---	------------------	--

Kemudian dari permasalahan-permasalahan yang ada dilakukan analisa USG (Analisis Urgency, Seriousness, Growth) adalah salah satu metode skoring untuk menyusun urutan prioritas permasalahan yang harus diselesaikan. Pada tahap ini masing-masing masalah dinilai tingkat risiko dan dampaknya. Bila telah didapatkan jumlah skor maka dapat menentukan prioritas masalah. Urgency (U) artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness (S) artinya seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth (G) artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Berikut uraian analisis dari permasalahan diatas :

Tabel 2.2.1.b
Analisis Permasalahan dengan Metode USG

No	Esensi Permasalahan		Sumber Data Permasalahan	Identifikasi Jenis Permasalahan	Penilaian			BOBOT	PRIORITAS
	Uraian	Sebab Akibat			Urgent	Seriousness	Growth		
1	Data Base belum mutakhir	Sehingganya potensi PAD belum tergali keseluruhan	<i>Audit BPK</i>	1.1. Belum Optimalnya Penggunaan Teknologi Digitalisasi	5	5	5	15	1
2	Lemahnya kepastian pelayanan pajak daerah	Sehingganya jangka waktu pelayanan bisa cepat bisa lambat	<i>Nilai SKM</i>	2.1. Belum Optimalnya Penggunaan Teknologi Digitalisasi	4	4	4	12	
				2.2. Kurangnya Produktifitas dan efektifitas SDM	5	5	5	15	1
3	Rendahnya kesadaran WP	Sehingganya menambah jumlah piutang pendapatan	<i>Audit BPK</i>	3.1. Belum Optimalnya Penggunaan Teknologi Digitalisasi	4	4	4	12	
				3.2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap WP	5	5	5	15	1

4	Perencanaan penganggaran belum berbasis kinerja	Sehingganya Belanja SKPD tidak mencerminkan kebutuhan pencapaian output	Audit BPK	4.1. Paradigma SKPD yang masih belum berubah tentang perencanaan penganggaran	4	5	4	13	
				4.2. Indikator kinerja kegiatan yang kurang jelas dan terukur	4	4	4	12	
5	Perencanaan penganggaran belum mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah	Sehingganya perencanaan penganggaran Silpa semakin tinggi	Audit BPK	5.1. Tingginya defisit anggaran	4	4	4	12	
				5.2. Tingginya Ketergantungan pada dana transfer	4	5	5	14	
6	Perencanaan penganggaran yang belum menerapkan Money Follow Program	Sehingganya belum terpenuhinya mandatory spending	Audit BPK	6.1. Masih besarnya variabel cost dari Fix Cost	4	4	4	12	
				6.2. Belum terpenuhinya belanja pegawai maksimal 30%	5	5	5	15	1
				6.3. Belum terpenuhinya belanja infrastruktur publik minimal 40%	5	4	5	14	
7	Laporan BMD belum akurat	masih banyak perbaikan pencatatan yang harus dilakukan	Audit BPK	7.1. Belum Optimalnya SDM yang ditugaskan	3	3	3	9	
				7.2. Belum Optimalnya penggunaan Aplikasi MIA	4	3	3	10	
8	Pengelolaan BMD belum tertib	Masih ditemukan pengelolaan aset yang belum sesuai	Audit BPK	8.1. Belum Optimalnya Pengelolaan BMD	4	4	4	12	
				8.2. Kurangnya Produktifitas dan efektifitas SDM dalam memaksimalkan pengelolaan BMD	4	4	3	11	

9	masih belum optimalnya penjelasan CaLK Laporan keuangan baik LK SKPD maupun LK konsolidasi	Sehingganya belum optimalnya kualitas laporan keuangan SKPD dan LKPD	<i>Audit BPK</i>	9.1. Belum Optimalnya Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5	5	5	15	1
10	Masih banyak SKPD yang memiliki SDM pembuat laporan keuangan yang baru dan tidak punya latar belakang akuntansi, baik itu THL maupun P3K.	Sehingganya Proses penyusunan laporan keuangan tidak maksimal dari segi waktu dan pemahaman	<i>Audit BPK</i>	10.1. Kurangnya Produktifitas dan efektifitas SDM	4	5	5	14	
11	Belum terintegrasinya Laporan keuangan yang bersumber dari BOSP, BOK, TPG dan BLUD	Sehingganya menambah kesulitan saat pengumpulan data laporan keuangan	<i>Audit BPK</i>	11.1. Belum Optimalnya Penggunaan Teknologi Digitalisasi	5	5	5	15	1

Hasil dari analisis USG diatas, maka dapat disimpulkan penyebab utama permasalahan, atau permasalahan mana yang dijadikan prioritas sehingga dapat dijadikan isu strategis dalam pencapaian tujuan.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh

rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Rencana Strategis BKD Kota Payakumbuh periode 2025-2029 ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh periode 2025-2029 dimana BKD Kota Payakumbuh menjadi salah satu OPD yang berperan penting dalam mencapai Opini WTP yang mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, akuntabel dan bersih untuk terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Maka dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi dimana terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam roda Pemerintahan di Kota Payakumbuh, BKD Kota Payakumbuh menetapkan beberapa isu-isu strategis dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan dan perkembangan Kota Payakumbuh selama beberapa tahun di belakang dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan potensi pengembangan pelayanan BKD Kota Payakumbuh di masa depan serta dengan menelaah dokumen-dokumen.

Salah satu aspek tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang harus diatur adalah permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah, berbagai macam bentuk peraturan perundangan tentang keuangan khususnya menyangkut keuangan daerah telah banyak diterbitkan. Namun pada hakikatnya dengan diterbitkannya peraturan perundangan agar pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel baik dari sisi penyusunan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah yang merupakan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai dengan hasil identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka isu strategis dari Badan Keuangan Daerah adalah:

1. **Belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah;**
2. **Belum optimalnya perencanaan penganggaran daerah;**
3. **Belum optimalnya penyerapan anggaran belanja daerah;**
4. **Belum optimalnya tata kelola aset daerah;**
5. **Belum optimalnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah;**
6. **Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur.**

Isu Strategis dapat tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.2
ISU STRATEGIS BKD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1. OPINI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 11 tahun berturut turut adalah WTP	Belum optimalnya penjelasan CaLK pada laporan keuangan pemerintah daerah	-	Memban- gun infrastruk- tur yang Tangguh, meningka- tkan inklusif dan keberlanj- utan serta mendoro- ng inovasi	Memperk- uat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperku- at pencegaha- n dan pemberan- tasan korupsi, narkoba, judi dan penyelund- upan	Tata Kelola Pemerint- ahan Bersih Dan Pelayana- n Publik Yang Efektif	Belum optimalnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
	Perencanaan penganggaran belum berbasis kinerja					Belum optimalnya perencanaan penganggaran daerah
	Penatausahaan keuangan harus mengikuti inovasi dan penyesuaian kebijakan pusat setiap saat					Belum optimalnya penyerapan anggaran belanja daerah
2. Rasio PAD tahun 2024 adalah 18,41%	Belum optimalnya penggunaan teknologi digitalisasi	-				Belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah
	Rendahnya kesadaran WP dan kepastian pelayanan pajak daerah					
3. Manajemen Aset tahun 2024 adalah ADA dan tersedia	Laporan BMD belum tertib dan belum akurat	-				Belum optimalnya tata kelola aset daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan definisi di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh :

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TERTIB, EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Berdasarkan definisi di atas, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah
3. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan

Untuk melihat keselarasan tujuan dan sasaran tersebut dijelaskan kedalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Keuangan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Periode RENSTRA					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan yang Berbasis Teknologi Informasi	1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1.Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	46,55%	35%	30%	30%	30%	30%
			1.2.Persentase penurunan SILPA	11%	10%	10%	9%	9%	9%
			1.3.Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	2.1.Persentase penambahan nilai aset tetap	2%	3%	4%	5%	5%	5%
		3. Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah	3.1.Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	19%	20%	21%	22%	23%	23%
			3.2.Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	4.1.Nilai AKIP oleh Inspektorat	77,71	77	80	80	80	80

Tabel 3.2.
Tahapan Renstra
Badan Keuangan Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
1. Optimalisasi tata kelola anggaran dengan penurunan persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru	1. Optimalisasi tata kelola anggaran dengan penurunan persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru	1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan upaya peningkatan pengawasan dan pelaporan serta penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan upaya peningkatan pengawasan dan pelaporan serta penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan upaya peningkatan pengawasan dan pelaporan serta penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital
2. Optimalisasi tata kelola aset daerah dengan penambahan nilai aset tetap	2. Optimalisasi tata kelola aset daerah dengan penambahan nilai aset tetap			
3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan upaya peningkatan pengawasan dan pelaporan serta penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan upaya peningkatan pengawasan dan pelaporan serta penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	2. Optimalisasi tata kelola akuntansi dan pelaporan dengan upaya perbaikan penjelasan Calk dan terintegrasinya laporan keuangan dalam satu sistem informasi keuangan berbasis digital	2. Optimalisasi tata kelola akuntansi dan pelaporan dengan upaya perbaikan penjelasan Calk dan terintegrasinya laporan keuangan dalam satu sistem informasi keuangan berbasis digital	2. Optimalisasi tata kelola akuntansi dan pelaporan dengan upaya perbaikan penjelasan Calk dan terintegrasinya laporan keuangan dalam satu sistem informasi keuangan berbasis digital

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat

dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan hal di atas, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran BKD dengan melakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh BKD untuk kurun waktu 2025- 2029 adalah :

1. Optimalisasi Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan;
2. Optimalisasi Tata Kelola Anggaran dan Perbendaharaan;
3. Optimalisasi Tata Kelola Aset;
4. Optimalisasi Penerimaan PAD;
5. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan;
6. Optimalisasi Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan;
7. Optimalisasi Produktifitas dan Efektifitas SDM.

3.4. Arah Kebijakan

Kebijakan yang akan diambil untuk pelaksanaan strategi diatas diantaranya adalah :

1. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dokumen keuangan;
3. Penerapan tata kelola pemerintahan yang produktif, efektif dan efisien.

Strategi dan kebijakan tersebut dapat tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan keuangan Daerah

VISI	"Payakumbuh maju bermartabat melalui pemberdayaan, pengembangan kualitas pendidikan, dan sentra UMKM yang kompetitif"		
MISI 3	"MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL dan KONDUSIF"		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan yang Berbasis Teknologi Informasi	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1 Optimalisasi Tata Kelola Anggaran	1. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dokumen keuangan; 3. Penerapan tata kelola pemerintahan yang produktif, efektif dan efisien.
		1.2 Optimalisasi Tata Kelola Perbendaharaan	
		1.3 Optimalisasi Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	
	2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	2.1 Optimalisasi Tata Kelola Aset	
	3. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	3.1 Optimalisasi Penerimaan PAD	
		3.2 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan	
		3.3 Optimalisasi Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	
	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	4.1 Optimalisasi Produktifitas dan Efektifitas SDM	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program, kegiatan dan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2025 – 2029 disesuaikan dengan amanat Permendagri 90 tahun 2019 dan Pemutakhiran yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mana program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah tersebut telah disusun kembali sesuai urusannya yang terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah;
 - 4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya;
 - 2) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Meubel;
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan;
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya;

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

h. Peningkatan Pelayanan BLUD

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD;

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 - 6) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
 - 7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - 8) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - 9) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - 2) Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya;
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan PFK;
 - 5) Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan instansi Terkait;
 - 6) Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan;

- 7) Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
 - 2) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
 - 4) Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - 6) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
 - 7) Sub Kegiatan Penyusunan Analisa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - 8) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - 9) Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 10) Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota;
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
- e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah;
 - 2) Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah;

- 3) Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota;

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan :

a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga;
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- 3) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- 4) Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- 5) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah;
- 6) Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah;
- 7) Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- 8) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- 9) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- 10) Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota;

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan :

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
- 3) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- 4) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- 5) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTPB);

- 6) Sub Kegiatan Penetapan WPD;
- 7) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- 8) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah;
- 9) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- 10) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah;
- 11) Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- 12) Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- 13) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.

Berikut disajikan pendanaan indikatif untuk seluruh program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dirinci dalam bentuk tabel sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut :

TABEL 4.1.1
Program Kegiatan Sub Kegiatan Badan Keuangan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	Ket
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				17.927.219.274,00		28.916.336.050,00		30.717.901.045,00		28.469.483.897,00		29.986.785.633,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.787.171.344,00		14.365.451.104,00		14.369.090.654,00		14.369.090.654,00		14.369.090.654,00		
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM	84.25	85.00	12.787.171.344,00	86.00	14.365.451.104,00	87.00	14.369.090.654,00	88.00	14.369.090.654,00	89.00	14.369.090.654,00	5.02.0.00.0.00.10.0 00 - Badan Keuangan Daerah	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				52.738.500,00		59.198.950,00		62.838.500,00		62.838.500,00		62.838.500,00		
Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	52.738.500,00	2	59.198.950,00	2	62.838.500,00	2	62.838.500,00	2	62.838.500,00		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				29.195.350,00		29.195.350,00		32.834.900,00		32.834.900,00		32.834.900,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	29.195.350,00	2	29.195.350,00	2	32.834.900,00	2	32.834.900,00	2	32.834.900,00		
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.542.150,00		21.003.600,00		21.003.600,00		21.003.600,00		21.003.600,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	4	21.542.150,00	4	21.003.600,00	4	21.003.600,00	4	21.003.600,00	4	21.003.600,00		
5.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.000.500,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	1.000.500,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00		

5.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.000.500,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1	1.000.500,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.093.490.704,00		10.093.327.054,00		10.093.327.054,00		10.093.327.054,00		10.093.327.054,00		
Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	10.093.490.704,00	1	10.093.327.054,00	1	10.093.327.054,00	1	10.093.327.054,00	1	10.093.327.054,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61	62		62		62		62		62			
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.515.950.754,00		9.515.950.754,00		9.515.950.754,00		9.515.950.754,00		9.515.950.754,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61	62	9.515.950.754,00	62	9.515.950.754,00	62	9.515.950.754,00	62	9.515.950.754,00	62	9.515.950.754,00		
5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				550.097.000,00		550.097.000,00		550.097.000,00		550.097.000,00		550.097.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	550.097.000,00	1	550.097.000,00	1	550.097.000,00	1	550.097.000,00	1	550.097.000,00		
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				27.442.950,00		27.279.300,00		27.279.300,00		27.279.300,00		27.279.300,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	27.442.950,00	4	27.279.300,00	4	27.279.300,00	4	27.279.300,00	4	27.279.300,00		
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				65.669.500,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		
Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	63	65	65.669.500,00	65	265.000.000,00	65	265.000.000,00	65	265.000.000,00	65	265.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	100		100		100		100		100			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	100		100		100		100		100			

5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				65.669.500,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	63	65	65.669.500,00	65	65.000.000,00	65	65.000.000,00	65	65.000.000,00	65	65.000.000,00		
5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	100	-	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	100	-	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				650.150.440,00		1.502.990.100,00		1.502.990.100,00		1.502.990.100,00		1.502.990.100,00		
Indeks layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8	650.150.440,00	8	1.502.990.100,00	8	1.502.990.100,00	8	1.502.990.100,00	8	1.502.990.100,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	41	41		41		41		41		41			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0			1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2		41		41		41		41			
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.565.800,00		3.630.000,00		3.630.000,00		3.630.000,00		3.630.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8	3.565.800,00	8	3.630.000,00	8	3.630.000,00	8	3.630.000,00	8	3.630.000,00		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				42.620.240,00		42.967.600,00		42.967.600,00		42.967.600,00		42.967.600,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	41	41	42.620.240,00	41	42.967.600,00	41	42.967.600,00	41	42.967.600,00	41	42.967.600,00		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				28.031.700,00		28.773.000,00		28.773.000,00		28.773.000,00		28.773.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	28.031.700,00	41	28.773.000,00	41	28.773.000,00	41	28.773.000,00	41	28.773.000,00		

5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0		-	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				59.383.200,00		53.119.500,00		53.119.500,00		53.119.500,00		53.119.500,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	59.383.200,00	12	53.119.500,00	12	53.119.500,00	12	53.119.500,00	12	53.119.500,00		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				515.549.000,00		1.367.000.000,00		1.367.000.000,00		1.367.000.000,00		1.367.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30	515.549.000,00	30	1.367.000.000,00	30	1.367.000.000,00	30	1.367.000.000,00	30	1.367.000.000,00		
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.000.500,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	1	1.000.500,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				133.062.200,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Persentase Ketersediaan BMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	4	133.062.200,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan													
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	4		4		4		4		4			
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		-		-		-		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-		-		-		-		-		
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				18.099.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	4	18.099.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				114.963.200,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	4	114.963.200,00	4	175.000.000,00	4	175.000.000,00	4	175.000.000,00	4	175.000.000,00		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				306.740.000,00		309.615.000,00		309.615.000,00		309.615.000,00		309.615.000,00		
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	3	306.740,00	3	309.615,00	3	309.615,00	3	309.615,00	3	309.615,00		

daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.220.000,00		6.095.000,00		6.095.000,00		6.095.000,00		6.095.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	3	3.220.000,00	3	6.095.000,00	3	6.095.000,00	3	6.095.000,00	3	6.095.000,00		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				303.520.000,00		303.520.000,00		303.520.000,00		303.520.000,00		303.520.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	303.520.000,00	4	303.520.000,00	4	303.520.000,00	4	303.520.000,00	4	303.520.000,00		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				385.320.000,00		385.320.000,00		385.320.000,00		385.320.000,00		385.320.000,00		
Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	385.320.000,00	1	385.320.000,00	1	385.320.000,00	1	385.320.000,00	1	385.320.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	36		36		36		36		36			
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.190.000,00		39.190.000,00		39.190.000,00		39.190.000,00		39.190.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	39.190.000,00	1	39.190.000,00	1	39.190.000,00	1	39.190.000,00	1	39.190.000,00		
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				312.250.000,00		312.250.000,00		312.250.000,00		312.250.000,00		312.250.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	36	312.250.000,00	36	312.250.000,00	36	312.250.000,00	36	312.250.000,00	36	312.250.000,00		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.880.000,00		33.880.000,00		33.880.000,00		33.880.000,00		33.880.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	33.880.000,00	5	33.880.000,00	5	33.880.000,00	5	33.880.000,00	5	33.880.000,00		
5.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				-		-		-		-		-		
Persentase fasilitasi pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan				-		-		-		-		-		

Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM	85.00	85.00	12.787.171.344,00	86.00	14.365.451.104,00	87.00	14.369.090.654,00	88.00	14.369.090.654,00	89.00	14.369.090.654,00	5.02.0.00.0.00.10.001 - UPTD Fasilitas Pembiayaan	
5.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.100.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Persentase Fasilitas Pembiayaan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1.100.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00		
5.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.100.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1.100.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				3.097.918.280,00		12.043.508.706,00		13.841.434.151,00		11.593.017.003,00		13.106.930.379,00		
Meningkatnya tata kelola anggaran, Meningkatnya tata kelola perbendaharaan, Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Penurunan SILPA	11.49	10.63	3.097.918.280,00	10.00	12.043.508.706,00	9.50	13.841.434.151,00	9.50	11.593.017.003,00	9.50	13.106.930.379,00	5.02.0.00.0.00.10.000 - Badan Keuangan Daerah	
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	51.27	35.00		30.00		30.00		30.00		30.00			
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian			
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.612.484.915,00		1.622.021.770,00		1.631.844.426,00		1.641.961.757,00		1.652.382.610,00		
Persentase Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah Diluar Tunjangan Guru dan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	5.537.150	1	1.612.484.915,00	1	1.622.021.770,00	1	1.631.844.426,00	1	1.641.961.757,00	1	1.652.382.610,00		
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	32.370.150	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	32.344.850	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	29.316.250	3		3		3		3		3			
	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	3.583.400	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.396.734.600	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	86.537.100	2		2		2		2		2			
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	33.596.700	1		1		1		1		1			

	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	21.856.400	1		1		1		1		1			
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				28.371.015,00		29.222.145,00		30.098.810,00		31.001.774,00		31.931.827,00		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	32.370.150	2	28.371.015,00	2	29.222.145,00	2	30.098.810,00	2	31.001.774,00	2	31.931.827,00		
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				28.882.150,00		29.748.614,00		30.641.073,00		31.560.305,00		32.507.114,00		
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	32.344.850	2	28.882.150,00	2	29.748.614,00	2	30.641.073,00	2	31.560.305,00	2	32.507.114,00		
5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				19.460.000,00		20.043.800,00		20.645.114,00		21.264.467,00		21.902.401,00		
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	21.856.400	1	19.460.000,00	1	20.043.800,00	1	20.645.114,00	1	21.264.467,00	1	21.902.401,00		
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				21.471.750,00		22.115.902,00		22.779.380,00		23.462.761,00		24.166.644,00		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	33.596.700	1	21.471.750,00	1	22.115.902,00	1	22.779.380,00	1	23.462.761,00	1	24.166.644,00		
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				3.144.300,00		3.238.629,00		3.335.788,00		3.435.862,00		3.538.937,00		
Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	3.583.400	1	3.144.300,00	1	3.238.629,00	1	3.335.788,00	1	3.435.862,00	1	3.538.937,00		
5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				5.981.000,00		6.160.430,00		6.345.243,00		6.535.600,00		6.731.668,00		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	5.537.150	1	5.981.000,00	1	6.160.430,00	1	6.345.243,00	1	6.535.600,00	1	6.731.668,00		
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1.398.034.250,00		1.401.137.587,00		1.404.333.715,00		1.407.625.726,00		1.411.016.498,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.396.734.600	2	1.398.034.250,00	2	1.401.137.587,00	2	1.404.333.715,00	2	1.407.625.726,00	2	1.411.016.498,00		
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				80.536.050,00		82.952.131,00		85.440.695,00		88.003.916,00		90.644.034,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	86.537.100	2	80.536.050,00	2	82.952.131,00	2	85.440.695,00	2	88.003.916,00	2	90.644.034,00		
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				26.604.400,00		27.402.532,00		28.224.608,00		29.071.346,00		29.943.487,00		

Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	29.316.250	3	26.604.400,00	3	27.402.532,00	3	28.224.608,00	3	29.071.346,00	3	29.943.487,00		
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				479.435.150,00		965.062.129,00		993.818.238,00		1.023.431.157,00		1.053.932.287,00		
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan dasar dan Persentase Penurunan SILPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5.418.750	3	0,00	3	9,00	3	8,00	3	7,00	3	00		
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	55.786.050	384		384		384		384		384			
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31.857.000	750		750		750		750		750			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	115.554.350	80		80		80		80		80			
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10.479.000	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	103.943.400	60		60		60		60		60			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	13.595.150	124		124		124		124		124			
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				6.519.250,00		6.720.956,00		6.726.829,00		6.727.005,00		6.727.010,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5.418.750	3	6.519.250,00	3	6.720.956,00	3	6.726.829,00	3	6.727.005,00	3	6.727.010,00		
5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				118.142.900,00		121.692.697,00		125.343.478,00		129.103.783,00		132.976.896,00		

Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	13.595.150	124	118.142.900,00	124	121.692.697,00	124	125.343.478,00	124	129.103.783,00	124	132.976.896,00		
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				110.036.600,00		113.359.199,00		116.759.975,00		120.262.774,00		123.870.658,00		
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	103.943.400	60	110.036.600,00	60	113.359.199,00	60	116.759.975,00	60	120.262.774,00	60	123.870.658,00		
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				36.388.800,00		39.711.650,00		40.903.000,00		42.130.089,00		43.393.992,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31.857.000	750	36.388.800,00	750	39.711.650,00	750	40.903.000,00	750	42.130.089,00	750	43.393.992,00		
5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				51.546.500,00		55.972.826,00		57.652.011,00		59.381.572,00		61.163.019,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	55.786.050	384	51.546.500,00	384	55.972.826,00	384	57.652.011,00	384	59.381.572,00	384	61.163.019,00		
5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				10.607.000,00		11.872.707,00		12.228.888,00		12.595.755,00		12.973.628,00		

Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10.479.000	2	10.607.000,00	2	11.872.707,00	2	12.228.888,00	2	12.595.755,00	2	12.973.628,00		
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				146.194.100,00		615.732.094,00		634.204.057,00		653.230.179,00		672.827.084,00		
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	115.554.350	80	146.194.100,00	80	615.732.094,00	80	634.204.057,00	80	653.230.179,00	80	672.827.084,00		
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				469.243.950,00		1.658.333.432,00		1.824.166.779,00		2.006.583.458,00		2.207.241.803,00		
Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	7.883.300	1	469.243.950,00	1	1.658.333.432,00	1	1.824.166.779,00	1	2.006.583.458,00	1	2.207.241.803,00		
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	67.825.750	93		93		93		93		93			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	35.495.050	86		86		86		86		86			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	28.333.800	60		60		60		60		60			
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	46.349.300	21		21		21		21		21			
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	50.464.750	37		37		37		37		37			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4.753.200	4		4		4		4		4			

	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	7.264.750	1		1		1		1		1			
5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				-		5.837.718,00		6.421.490,00		7.063.639,00		7.770.003,00		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4.753.200	4	-	4	5.837.718,00	4	6.421.490,00	4	7.063.639,00	4	7.770.003,00		
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				19.403.650,00		574.244.075,00		631.668.483,00		694.835.331,00		764.318.864,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	35.495.050	86	19.403.650,00	86	574.244.075,00	86	631.668.483,00	86	694.835.331,00	86	764.318.864,00		
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				54.681.950,00		60.764.952,00		66.841.447,00		73.525.592,00		80.878.151,00		
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	46.349.300	21	54.681.950,00	21	60.764.952,00	21	66.841.447,00	21	73.525.592,00	21	80.878.151,00		
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				45.673.900,00		526.949.223,00		579.644.146,00		637.608.561,00		701.369.417,00		
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	50.464.750	37	45.673.900,00	37	526.949.223,00	37	579.644.146,00	37	637.608.561,00	37	701.369.417,00		
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				65.088.700,00		79.507.686,00		87.458.456,00		96.204.301,00		105.824.731,00		
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	67.825.750	93	65.088.700,00	93	79.507.686,00	93	87.458.456,00	93	96.204.301,00	93	105.824.731,00		

5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				7.035.100,00		34.535.659,00		37.989.225,00		41.788.148,00		,00	45.966.963		
Tertindakannya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	7.883.300	1	7.035.100,00	1	34.535.659,00	1	37.989.225,00	1	41.788.148,00	1	,00	45.966.963		
5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				7.074.950,00		10.346.487,00		11.381.136,00		12.519.250,00		,00	13.771.175		
Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	1	7.074.950,00	1	10.346.487,00	1	11.381.136,00	1	12.519.250,00	1	,00	13.771.175		
5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				7.910.800,00		9.572.637,00		10.529.901,00		11.582.891,00		,00	12.741.180		
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	7.264.750	1	7.910.800,00	1	9.572.637,00	1	10.529.901,00	1	11.582.891,00	1	,00	12.741.180		
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				262.374.900,00		356.574.995,00		392.232.495,00		431.455.745,00		,00	474.601.319		
Tertindakannya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	28.333.800	60	262.374.900,00	60	356.574.995,00	60	392.232.495,00	60	431.455.745,00	60	,00	474.601.319		
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				290.409.265,00		7.282.306.237,00		8.824.241.055,00		6.296.940.612,00			7.506.863.659,00		
Persentase Pengelolaan Urusan Kewenangan Daerah dan Bantuan Yang tersalurkan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	762.000.000	1	290.409.265,00	1	7.282.306.237,00	1	8.824.241.055,00	1	6.296.940.612,00	1		7.506.863.659,00		
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				290.409.265,00		7.282.306.237,00		8.824.241.055,00		6.296.940.612,00			7.506.863.659,00		
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	762.000.000	1	290.409.265,00	1	7.282.306.237,00	1	8.824.241.055,00	1	6.296.940.612,00	1		7.506.863.659,00		
5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				246.345.000,00		515.785.138,00		567.363.653,00		624.100.019,00			686.510.020,00		
Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	125.182.600	3	246.345.000,00	3	515.785.138,00	3	567.363.653,00	3	624.100.019,00	3		686.510.020,00		

	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	86.899.350	31		31		31		31		31			
	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	10.804.050	44		44		44		44		44			
5.02.02.2.05.0001 - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				10.070.300,00		13.008.879,00		14.309.768,00		15.740.745,00		17.314.819,00		
Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	10.804.050	44	10.070.300,00	44	13.008.879,00	44	14.309.768,00	44	15.740.745,00	44	17.314.819,00		
5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				102.852.800,00		393.253.380,00		432.578.718,00		475.836.590,00		523.420.249,00		
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	125.182.600	3	102.852.800,00	3	393.253.380,00	3	432.578.718,00	3	475.836.590,00	3	523.420.249,00		
5.02.02.2.05.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				133.421.900,00		109.522.879,00		120.475.167,00		132.522.684,00		145.774.952,00		
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	86.899.350	31	133.421.900,00	31	109.522.879,00	31	120.475.167,00	31	132.522.684,00	31	145.774.952,00		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				915.159.650,00		1.046.611.640,00		1.046.611.640,00		1.046.611.640,00		1.050.000.000,00		
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	0	5.00	915.159.650,00	7.00	1.046.611.640,00	7.00	1.046.611.640,00	7.00	1.046.611.640,00	7.00	1.050.000.000,00	5.02.0.00.0.00.10.00 - Badan Keuangan Daerah	
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				915.159.650,00		1.046.611.640,00		1.046.611.640,00		1.046.611.640,00		1.050.000.000,00		
Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			915.159.650,00	31	1.046.611.640,00	31	1.046.611.640,00	31	1.046.611.640,00	31	1.050.000.000,00		
	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5.357.200	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	46.441.250	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	84.475.200	31		31		31		31		31			
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	78.457.500	31		31		31		31		31			

	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	39.163.750	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	0	31		31		31		31		31			
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	9.224.600	31		31		31		31		31			
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	677.707.150	31		31		31		31		31			
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				62.785.450,00		58.444.150,00		58.444.150,00		58.444.150,00		,00	58.444.150	
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5.357.200	1	62.785.450,00	1	58.444.150,00	1	58.444.150,00	1	58.444.150,00	1	,00	58.444.150	
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				41.268.700,00		41.740.500,00		41.740.500,00		41.740.500,00		,00	41.740.500	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	46.441.250	2	41.268.700,00	2	41.740.500,00	2	41.740.500,00	2	41.740.500,00	2	,00	41.740.500	
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				318.822.500,00		320.871.000,00		320.871.000,00		320.871.000,00		,00	320.871.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	84.475.200	31	318.822.500,00	31	320.871.000,00	31	320.871.000,00	31	320.871.000,00	31	,00	320.871.000	
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				341.660.300,00		255.878.190,00		255.878.190,00		255.878.190,00		,00	259.266.550	
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	0	31	341.660.300,00	31	255.878.190,00	31	255.878.190,00	31	255.878.190,00	31	,00	259.266.550	
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				-		44.997.300,00		44.997.300,00		44.997.300,00		,00	44.997.300	
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	39.163.750	1	-	1	44.997.300,00	1	44.997.300,00	1	44.997.300,00	1	,00	44.997.300	
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				62.861.050,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		,00	130.000.000	
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	677.707.150	31	62.861.050,00	31	130.000.000,00	31	130.000.000,00	31	130.000.000,00	31	,00	130.000.000	
5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				77.849.550,00		78.457.500,00		78.457.500,00		78.457.500,00		,00	78.457.500	

Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	78.457.500	31	77.849.550,00	31	78.457.500,00	31	78.457.500,00	31	78.457.500,00	31	78.457.500,00		
5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				9.912.100,00		60.223.000,00		60.223.000,00		60.223.000,00		60.223.000,00		
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	9.224.600	31	9.912.100,00	31	60.223.000,00	31	60.223.000,00	31	60.223.000,00	31	60.223.000,00		
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				-		56.000.000,00		56.000.000,00		56.000.000,00		56.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			-	31	56.000.000,00	31	56.000.000,00	31	56.000.000,00	31	56.000.000,00		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.126.970.000,00		1.460.764.600,00		1.460.764.600,00		1.460.764.600,00		1.460.764.600,00		
Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah, Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	18.19	19.00	1.126.970.000,00	20.00	1.460.764.600,00	21.00	1.460.764.600,00	22.00	1.460.764.600,00	23.00	1.460.764.600,00	5.02.0.00.0.00.10.00 - Badan Keuangan Daerah	
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				966.941.200,00		1.213.224.600,00		1.213.224.600,00		1.213.224.600,00		1.213.224.600,00		
Persentase Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	34.910.950	2	966.941.200,00	2	1.213.224.600,00	2	1.213.224.600,00	2	1.213.224.600,00	2	1.213.224.600,00		
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	31.741.700	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	96.106.980	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	89.125.300	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	91.888.400	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	34.194.450	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	36.566.000	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	79.494.250	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	95.954.180	12		12		12		12		12			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	45.811.945	25		25		25		25		25			
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				72.894.150,00		156.278.250,00		156.278.250,00		156.278.250,00		156.278.250,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	79.494.250	12	72.894.150,00	12	156.278.250,00	12	156.278.250,00	12	156.278.250,00	12	156.278.250,00		
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				162.267.700,00		311.070.050,00		311.070.050,00		311.070.050,00		311.070.050,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	45.811.945	25	162.267.700,00	25	311.070.050,00	25	311.070.050,00	25	311.070.050,00	25	311.070.050,00		
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				133.066.650,00		141.516.000,00		141.516.000,00		141.516.000,00		141.516.000,00		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	34.194.450	12	133.066.650,00	12	141.516.000,00	12	141.516.000,00	12	141.516.000,00	12	141.516.000,00		
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				36.717.450,00		36.566.350,00		36.566.350,00		36.566.350,00		36.566.350,00		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	36.566.000	1	36.717.450,00	1	36.566.350,00	1	36.566.350,00	1	36.566.350,00	1	36.566.350,00		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				72.679.100,00		34.969.750,00		34.969.750,00		34.969.750,00		34.969.750,00		
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	34.910.950	2	72.679.100,00	2	34.969.750,00	2	34.969.750,00	2	34.969.750,00	2	34.969.750,00		
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				71.740.950,00		89.827.150,00		89.827.150,00		89.827.150,00		89.827.150,00		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	89.125.300	12	71.740.950,00	12	89.827.150,00	12	89.827.150,00	12	89.827.150,00	12	89.827.150,00		
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				-		36.566.350,00		36.566.350,00		36.566.350,00		36.566.350,00		
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	0	0	-	12	36.566.350,00	12	36.566.350,00	12	36.566.350,00	12	36.566.350,00		
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				33.295.500,00		31.741.250,00		31.741.250,00		31.741.250,00		31.741.250,00		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	31.741.700	1	33.295.500,00	1	31.741.250,00	1	31.741.250,00	1	31.741.250,00	1	31.741.250,00		

5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				-		31.741.250,00		31.741.250,00		31.741.250,00		31.741.250,00		
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0	0	-	12	31.741.250,00	12	31.741.250,00	12	31.741.250,00	12	31.741.250,00		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				124.666.800,00		96.105.800,00		96.105.800,00		96.105.800,00		96.105.800,00		
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	96.106.980	12	124.666.800,00	12	96.105.800,00	12	96.105.800,00	12	96.105.800,00	12	96.105.800,00		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				94.050.200,00		91.888.200,00		91.888.200,00		91.888.200,00		91.888.200,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	91.888.400	1	94.050.200,00	1	91.888.200,00	1	91.888.200,00	1	91.888.200,00	1	91.888.200,00		
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				165.562.700,00		154.954.200,00		154.954.200,00		154.954.200,00		154.954.200,00		
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	95.954.180	12	165.562.700,00	12	154.954.200,00	12	154.954.200,00	12	154.954.200,00	12	154.954.200,00		
Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah, Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	2	2	1.126.970.000,00	2	1.460.764.600,00	2	1.460.764.600,00	2	1.460.764.600,00	2	1.460.764.600,00	5.02.0.00.0.00.10.00 - UPTD Pajak Daerah	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				160.028.800,00		247.540.000,00		247.540.000,00		247.540.000,00		247.540.000,00		
Persentase Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2	2	160.028.800,00	2	247.540.000,00	2	247.540.000,00	2	247.540.000,00	2	247.540.000,00		
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				160.028.800,00		247.540.000,00		247.540.000,00		247.540.000,00		247.540.000,00		
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2	2	160.028.800,00	2	247.540.000,00	2	247.540.000,00	2	247.540.000,00	2	247.540.000,00		

TABEL 4.1.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas
Dalam Mendukung Kegiatan Prioritas

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
			Pembinaan Sistem informasi Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	
2	PROGRAM PENGELOLAAN BMD	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	

			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	
			Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	Administrasi Kepegawaian PD	
			Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan	
			Bimtek Implementasi Peraturan PerUndang-Undangan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sekaligus mendukung dan mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah.

Indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. OPINI BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah;
2. Nilai AKIP oleh Inspektorat.

Indikator diatas di targetkan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Badan Keuangan Daerah

NO	INDIKATOR	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	OPINI BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	NILAI AKIP oleh Inspektorat	Nilai	77,71	77	80	80	80	80	

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penentuan pencapaian keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tujuan dan sasaran kinerja perangkat daerah juga tergambar pada indikator kinerja kunci dan indikator kinerja lainnya yang merupakan target dari indikator kinerja daerah. Baik indikator kinerja kunci dan indikator kinerja lainnya yang berkaitan dengan indikator kinerja perangkat daerah, ditargetkan dan digambarkan dalam kurun tahun periode RPJMD Tahun 2025-2029.

Berikut uraian indikator dimaksud :

Tabel 4.3.1
Tabel Indikator Kinerja Lainnya yang Menjadi Urusan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Keuangan Daerah

NO	INDIKATOR	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persentase	28,23%	28%	28%	28%	28%	28%	IKK
2	Rasio PAD terhadap APBD	Persentase	18,40%	19%	20%	20%	20%	20%	IKK

3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer Ekspenditures)	Persentase	85,87%	85%	85%	85%	85%	85%	IKK
4	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persentase	(7,36%)	(7%)	(7%)	(7%)	(7%)	(7%)	IKK
5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persentase	6,51%	6%	6%	6%	6%	6%	IKK
6	Manajemen Aset	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK
7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persentase	11,49%	11%	11%	11%	11%	11%	IKK
8	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Persentase	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK

Tabel 4.3.2
Tabel Indikator Kinerja Lainnya yang Menjadi Urusan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Lainnya (IKL) Badan Keuangan Daerah

NO	INDIKATOR	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Skor	72	72,5	73	73,5	74	74,5	
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

3	Persentase belanja pegawai terhadap belanja daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Persentase	46,55%	35%	30%	30%	30%	30%	
4	Persentase penurunan SILPA	Persentase	11%	10%	10%	9%	9%	9%	
5	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase penambahan nilai aset tetap	Persentase	2%	3%	4%	5%	5%	5%	
7	Persentase penerimaan PAD terhadap total penerimaan pendapatan	Persentase	19%	20%	21%	22%	23%	23%	
8	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 di lakukan seiring dengan berakhirnya masa Renstra Tahun 2023-2026 dan berakhirnya masa RPD 2023 – 2026 serta adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, menjadi acua bagi penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 pasca pemilihan kepala daerah serentak. Disamping itu adanya perubahan regulasi yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional, juga menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen ini.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKD Kota Payakumbuh tahun 2025-2029 adalah sebagai dokumen perencanaan teknokratis yang memperhatikan input perencanaan yaitu hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran untuk tahun berikutnya, dengan memperhatikan isu strategis dan arah kebijakan. Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran dan program, lalu upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen Renstra ini. Seluruh komponen organisasi dan stakeholder ikut bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antar rencana sehingga diharapkan rencana kerja dan kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Payakumbuh, September 2025

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



Drs. BASNIDA EFRIZAL, M. Si
NIP. 19710412 199101 1 001

LAMPIRAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BKD TAHUN 2025-2029
METADATA INDIKATOR KINERJA

1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1.1 Nama Indikator	Persentase Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah Diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD
Definisi	Mengukur Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{jumlah belanja pegawai diluar guru}}{\text{jumlah APBD}} \times 100\%$
Interpretasi	1. Pembilang Jumlah belanja pegawai diluar guru adalah jumlah realisasi seluruh komponen belanja pegawai antara lain gaji, tunjangan yang melekat pada gaji dan tunjangan kinerja, tidak termasuk belanja pegawai guru 2. Penyebut Jumlah APBD adalah jumlah realisasi seluruh belanja daerah
Sumber Data	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD
Frekuensi	Tahunan

1.2 Nama Indikator	Persentase Penurunan SILPA
Definisi	Mengukur Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{nilai realisasi SILPA}}{\text{total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Interpretasi	1. Pembilang Nilai realisasi SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) dalam APBD pada tahun pelaporan 2. Penyebut Total belanja anggaran dalam APBD yang ditetapkan pada tahun sebelumnya (APBD sebelum perubahan/murni)
Sumber Data	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD
Frekuensi	Tahunan

1.3 Nama Indikator	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu
Definisi	Melihat perkembangan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah dan kualitas dari tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{tanggal penyampaian yang ditentukan}}{\text{tanggal penyampaian yang dilaksanakan}} \times 100\%$
Interpretasi	1. Pembilang Tanggal penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK RI Perwakilan Sumbar pada tahun berjalan yang telah ditentukan (pada akhir maret setiap tahunnya) 2. Penyebut Tanggal penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK RI Perwakilan Sumbar pada tahun berjalan yang dilaksanakan oleh BKD dan Pemerintah Kota Payakumbuh ke Kantor BPK RI
Sumber Data	BPK RI/Dokumentasi/Surat Penyampaian oleh BKD
Frekuensi	Tahunan

2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

2.1 Nama Indikator	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
Definisi	Mengukur Rasio Nilai Aset Tetap
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{total aset tetap tahun berjalan (tahun n)}}{\text{Total aset tetap tahun n-1}} \times 100\%$
Interpretasi	1. Pembilang Dokumen daftar aset tetap atau hasil inventarisasi aset tahunan atau nilai aset tetap yang tercantum dalam laporan anggaran yang merupakan laporan tahun berjalan 2. Penyebut Dokumen daftar aset tetap atau hasil inventarisasi aset tahunan atau nilai aset tetap yang tercantum dalam laporan keuangan yang merupakan laporan tahun n-1 atau tahun sebelumnya
Sumber Data	BKD/Neraca
Frekuensi	Tahunan

3 Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah

3.1 Nama Indikator	Persentase Penerimaan PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan
Definisi	Mengukur Tax Rasio atau Kemampuan Daerah dalam mengumpulkan Pajak dari Potensi Pajak Daerah
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{jumlah PAD}}{\text{jumlah pendapatan pada APBD}} \times 100\%$
Interpretasi	1. Pembilang Jumlah realisasi seluruh pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah 2. Penyebut Jumlah realisasi seluruh pendapatan daerah yang meliputi PAD, pendapatan transfer, dan lain lain pendapatan daerah yang sah
Sumber Data	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD
Frekuensi	Tahunan

3.2 Nama Indikator	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital
Definisi	Melihat kemampuan Pemerintah Daerah dalam menerapkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang berbasis digital
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{jumlah sarana prasarana digitalisasi yang dibutuhkan}}{\text{jumlah sarana prasarana digitalisasi yang tersedia}} \times 100\%$
Interpretasi	1. Pembilang Jumlah sarana prasarana dimaksud adalah jumlah sarana prasarana baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang dibutuhkan yang terdapat pada laporan RKBMD dan RKBMD Perubahan serta Laporan Data Base Pajak dan Retribusi Daerah 2. Penyebut Jumlah sarana prasarana dimaksud adalah jumlah sarana prasarana baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang tersedia yang terdapat pada laporan RKBMD dan RKBMD Perubahan serta Laporan Data Base Pajak dan Retribusi Daerah
Sumber Data	BKD
Frekuensi	Tahunan

4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan

4.1 Nama Indikator		Nilai AKIP oleh Inspektorat
Definisi	Melihat kemampuan organisasi mengukur pencapaian kinerja yang berorientasi hasil	
Rumus Perhitungan	1. Bobot Perencanaan Kinerja 2. Bobot Pengukuran Kinerja 3. Bobot Pelaporan Kinerja 4. Bobot Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
Interpretasi	Merupakan jumlah bobot dari keempat komponen kinerja atau kriteria dimaksud	
Sumber Data	LHE Inspektorat	
Frekuensi	Tahunan	

LAMPIRAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BKD TAHUN 2025-2029
METADATA INDIKATOR KINERJA

FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN

1	Nama Indikator	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan
	Definisi	Mengukur Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan
	Rumus Perhitungan	$\frac{\text{jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{jumlah APBD}} \times 100\%$
	Interpretasi	1. Pembilang Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan adalah jumlah realisasi seluruh komponen belanja pegawai antara lain gaji, tunjangan yang melekat pada gaji dan tunjangan kinerja, tidak termasuk belanja pegawai guru dan tenaga kesehatan 2. Penyebut Jumlah APBD adalah jumlah realisasi seluruh belanja daerah
	Sumber Data	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD
	Frekuensi	Tahunan

2	Nama Indikator	Rasio PAD
	Definisi	Mengukur Tax Ratio atau Kemampuan Daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah
	Rumus Perhitungan	$\frac{\text{jumlah PAD}}{\text{jumlah pendapatan pada APBD}} \times 100\%$
	Interpretasi	1. Pembilang Jumlah realisasi seluruh pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah 2. Penyebut Jumlah realisasi seluruh pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain lain pendapatan daerah yang sah
	Sumber Data	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD
	Frekuensi	Tahunan

3	Nama Indikator	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure)
	Definisi	Mengukur efisiensi belanja langsung diluar transfer expenditure atau rasio belanja langsung dalam APBD diluar transfer expenditures
	Rumus Perhitungan	$\frac{\text{jumlah belanja urusan pemerintahan} - \text{transfer expenditures}}{\text{jumlah belanja APBD}} \times 100\%$
	Interpretasi	1. Pembilang Jumlah belanja urusan pemerintahan dikurangi transfer expenditures adalah jumlah belanja urusan pemerintahan yang meliputi seluruh belanja daerah diluar belanja modal dikurangi transfer expenditures yang meliputi hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Atau bisa juga penjumlahan dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa 2. Penyebut Jumlah belanja APBD adalah jumlah realisasi seluruh belanja daerah
	Sumber Data	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD
	Frekuensi	Tahunan

4	Nama Indikator	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD
	Definisi	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal
	Rumus Perhitungan	$\frac{\text{nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{total belanja APBD}} - 1 \times 100\%$
	Interpretasi	1. Pembilang Nilai realisasi belanja daerah dalam APBD tahun pelaporan yang merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Nilai absolut dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus 2. Penyebut Total anggaran belanja APBD tahun pelaporan sebelum perubahan
	Sumber Data	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD
	Frekuensi	Tahunan

5	Nama Indikator	Manajemen Aset
	Definisi	Melihat Manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada
	Rumus Perhitungan	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)
	Interpretasi	Manajemen aset adalah menjawab pertanyaan pada rumus diatas dengan format Ya/Tidak. Apabila seluruh terjawab ya, Pemerintah Daerah mencapai realisasi 100 persen
	Sumber Data	Neraca/Laporan Aset/BKD
	Frekuensi	Tahunan

6	Nama Indikator	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya
	Definisi	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
	Rumus Perhitungan	$\frac{\text{nilai realisasi SILPA}}{\text{total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$
	Interpretasi	1. Pembilang Nilai realisasi SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) dalam APBD pada tahun pelaporan 2. Penyebut Total belanja anggaran dalam APBD yang ditetapkan pada tahun sebelumnya (APBD sebelum perubahan/murni)
	Sumber Data	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD
	Frekuensi	Tahunan

IPKD

1	Nama Indikator	IPKD
	Definisi	Melihat nilai dari kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah
	Rumus Perhitungan	1. Bobot Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran = 15 2. Bobot Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD = 20 3. Bobot Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah = 15 4. Bobot Dimensi Penyerapan Anggaran = 20 5. Bobot Dimensi Kondisi Keuangan Daerah = 15 6. Bobot Dimensi Opini BPK atas LKPD = 15
	Interpretasi	Merupakan jumlah bobot dari keenam komponen kinerja atau kriteria dimaksud
	Sumber Data	BKD/SK Mendagri Hasil Pengukuran IPKD
	Frekuensi	Tahunan

POHON KINERJA BKD TAHUN 2025-2029

KOTA

MENINGKATNYA
BIROKRASI YANG
BERSIH DAN
AKUNTABEL

OPINI RPK

ES II

1.MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
IK 1.1.Opini BPK atas LKPD;
IK 1.2.Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD;
IK 1.3.Persentase penurunan SILPA;
2.MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN ASET DAERAH
IK 2.1.Persentase penambahan nilai aset tetap;
3.MENINGKATNYA KAPASITAS FISKAL DAERAH
IK 3.1.Persentase PAD terhadap pendapatan daerah;
IK 3.2.Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital;
4.MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN
IK 4.1.Nilai AKIP oleh Inspektorat.

ES III

1. MENINGKATNYA TATA KELOLA AKUNTANSI DAN PELAPORAN
IK 1.LKPD tepat waktu.

2.MENINGKATNYA TATA KELOLA ANGGARAN
IK 1.Perda APBD tepat waktu.

3.MENINGKATNYA TATA KELOLA PERBENDAHARAAN
IK 1.Persentase penurunan SILPA;
IK 2.Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar.

4.MENINGKATNYA TATA KELOLA ASET DAERAH
IK 1.Persentase penambahan nilai aset tetap.

5. MENINGKATNYA TATA KELOLA PENDAPATAN DAERAH
IK 1.Ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan;
IK 2.Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan;
IK 3.Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital.

2.MENINGKATNYA NILAI AKIP BKD
IK 1.Tersedianya dokumen perencanaan kinerja;
IK 2.Tersedianya dokumen pengukuran kinerja;
IK 3.Tersedianya dokumen pelaporan kinerja;
IK 4.Monitoring dan evaluasi kinerja.

ES IV/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA

1. Persentase LKPD yang sesuai dengan SAP;
1.1.Jumlah SKPD yang dibina ; 1.2.Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi.
2. Persentase LKPD yang memenuhi SPIP;
2.1.Jumlah SKPD yang dibina ; 2.2.Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi; 2.3.Jumlah penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan kerugian daerah
3. Persentase LKPD yang mematuhi peraturan PerUndang-Undangan;
3.1.Jumlah SKPD yang dibina ; 3.2.Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi.
4. Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital dalam pelaporan akuntansi;
2.1.Persentase kualitas sarana dan prasarana yang tersedia;
2.2.Jumlah laporan keuangan, pertanggungwbn pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan, semesteran.
5. Tersedianya regulasi/kebijakan/ pelaporan dan akuntansi.
5.1.Jumlah regulasi/kebijakan/ perda/perwaka yang dihasilkan.

1.Tersedianya regulasi/kebijakan terkait penganggaran;
1.1.Jumlah regulasi dan kebijakan/perda perwako APBD yang tersedia;
2.Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru;
2.1.Jumlah verifikasi RKA dan DPA;
2.2.Jumlah verifikasi perubahan RKA dan perubahan DPA.
3.Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik;
3.1.Jumlah verifikasi RKA dan DPA;
3.2.Jumlah verifikasi perubahan RKA dan perubahan DPA.
4. Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital dalam penganggaran.
4.1.Persentase kualitas sarana dan prasarana yang tersedia;
4.2.Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD.

1.Tersedianya regulasi/kebijakan terkait perbendaharaan;
1.1.Jumlah regulasi dan kebijakan/ Perwako/SPD/SE yang tersedia;
2.Tersedianya dokumen KASDA;
2.1.Jumlah dokumen/berita acara/rekonsiliasi data/laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas yang tersedia.
3. Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital dalam perbendaharaan.
3.1.Jumlah dokumen penatausahaan belanja;
3.2.Persentase kualitas sapras yang tersedia.

1.Tersedianya regulasi/kebijakan terkait aset daerah;
1.1.Jumlah regulasi dan kebijakan/ regulasi dan kebijakan/ Perwako/SPD/SE yang tersedia;
2.Tersedianya daftar aset tetap;
2.1.Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi; 2.2.Jumlah SKPD yang dibina; 2.3.Jumlah daftar aset tetap SKPD.
3.Tersedianya manual untuk menyusun daftar aset tetap;
3.1.Jumlah manual untuk menyusun daftar aset tetap.
4.Tersedianya proses inventarisasi aset tahunan;
4.1.Jumlah SKPD yang dibina; 4.2.Jumlah rekonsiliasi yang dilaksanakan; 4.3.Jumlah daftar inventarisasi aset.
5. Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital dalam pengelolaan aset.
2.1.Persentase kualitas sarana dan prasarana yang tersedia.

1.Tersedianya regulasi/kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah;
1.1.Jumlah regulasi yang tersedia;
1.2.Intensitas penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan.
2.Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital dalam pengelolaan pendapatan;
2.1.Persentase kualitas sarana dan prasarana yang tersedia;
2.2.Jumlah laporan elektronifikasi transaksi pendapatan.
3. Kualitas layanan pajak daerah
3.1.Persentase kualitas sarana dan prasarana yang tersedia;
3.2.Persentase kualitas sdm yang tersedia;
3.3.Nilai IKM.

1.Kualitas layanan umum BKD
1.1.Persentase kualitas sarana prasarana yang tersedia; 1.2.Persentase kualitas sdm yang tersedia.
2.Tersedianya dokumen program dan keuangan BKD
2.1.Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja;
2.2.Jumlah dokumen penatausahaan keuangan; 2.3.Jumlah dokumen evaluasi kinerja.

TABEL
Penetapan Konteks Resiko Strategis
BADAN KEUANGAN DAERAH

PENETAPAN KONTEKS RESIKO STRATEGIS		
TUJUAN Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan yang Berbasis Teknologi Informasi		
Nama Unit Kerja	:	Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Periode	:	Tahun 2025 - 2029
Sasaran Strategis PD	:	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah
		3. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan
Indikator Kinerja Sasaran PD	:	1.1. Opini BPK atas Laporan keuangan
		1.2. Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD
		1.3. Persentase penurunan SILPA
		2.1. Persentase penambahan nilai aset tetap
		3.1. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah
		3.2. Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital
		4.1. Nilai AKIP oleh Inspektorat
Urusan Pemerintah Daerah	:	1. Urusan Pemerintah Wajib : Keuangan
Program Pembangunan	:	1.1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		1.2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		1.3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		1.4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1. OPINI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 11 tahun berturut turut adalah WTP	Belum optimalnya penjelasan CaLK pada laporan keuangan pemerintah daerah	-	Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan inklusif dan keberlanjutan serta mendorong inovasi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	Belum optimalnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
	Perencanaan penganggaran belum berbasis kinerja					Belum optimalnya perencanaan penganggaran daerah
	Penatausahaan keuangan harus mengikuti inovasi dan penyesuaian kebijakan pusat setiap saat					Belum optimalnya penyerapan anggaran belanja daerah
2. Rasio PAD tahun 2024 adalah 18,41%	Belum optimalnya penggunaan teknologi digitalisasi	-				Belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah
	Rendahnya kesadaran WP dan kepastian pelayanan pajak					
3. Manajemen Aset tahun 2024 adalah ADA dan tersedia	Laporan BMD belum tertib dan belum akurat	-				Belum optimalnya tata kelola aset daerah

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan SASARAN RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan yang Berbasis Teknologi Informasi	1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1.Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	46,55%	35%	30%	30%	30%	30%	
			1.2.Persentase penurunan SILPA	11%	10%	10%	9%	9%	9%	
			1.3.Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	2.1.Persentase penambahan nilai aset tetap	0,30%	2%	3%	4%	5%	5%	
		3. Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah	3.1.Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	19%	20%	21%	22%	23%	23%	
			3.2.Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	4.1.Nilai AKIP oleh Inspektorat	77,71	77	80	80	80	80	

Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket
1	Meningkatkan transparansi dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	3. Peningkatan penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih baik, khususnya aset sekolah, sarana kesehatan, aset pasar, perkantoran dan infrastruktur lainnya	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah;	
		4. Peningkatan kerjasama dengan kabupaten lima puluh kota terkait dengan pengelolaan aset	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah;	
		5. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (pinjaman daerah, KPBD, CSR , jasa ekosistem, perdagangan karbon, pembayaran retribusi non tunai, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan TKD, sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dan nasional	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dokumen keuangan;	
		6. Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan bmd, dan akuntansi pemerintahan berbasis akrual	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah;	
		7. Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah;	
		8. Optimalisasi sumber sumber pembiayaan dan pendapatan daerah	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dokumen keuangan;	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK dan SASARAN RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan yang Berbasis Teknologi Informasi	1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran	Perda APBD tepat waktu	1.1.Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Program pengelolaan keuangan daerah	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran	1.2.Persentase penurunan SILPA	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
						Program pengelolaan keuangan daerah	
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Laporan keuangan berbasis akrual	1.3.Persentase laporan keuangan tepat waktu	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
						Program pengelolaan keuangan daerah	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
		2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase PD yang menyediakan laporan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD	2.1.Persentase penambahan nilai aset tetap	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup	
						Program pengelolaan barang milik daerah	
		3. Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	3.1.Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program pengelolaan pendapatan daerah	
						Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	3.2.Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital